



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**PERENCANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DI
 KECAMATAN ILIR BARAT DUA KOTA PALEMBANG**

Deven Hanyaken^{1)*}, Abdullah Qiqi Asmara²⁾, Rosidawani²⁾, Elias Pikal³⁾, Fajar Sadik Islami⁴⁾

¹⁾ Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya

²⁾ Dosen Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya

³⁾ Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Sriwijaya

⁴⁾ Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tridinianti

*Corresponding Author, email: deven.hanyaken@gmail.com

Artikel Info	ABSTRAK
Diterima : 24 Oktober 2025 Disetujui : 29 November 2025 Diterbitkan : 11 Desember 2025	Infrastruktur pelayanan dasar publik yang lebih baik diperlukan untuk pertumbuhan sektor perumahan dan permukiman. Infrastruktur perumahan diperlukan seiring pertumbuhan suatu wilayah. Infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat aktivitas warga memainkan peran penting dalam meningkatkan lingkungan hidup perkotaan. Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan yang juga memiliki permasalahan terhadap kualitas permukiman yaitu lingkungan kumuh. Pada penelitian ini dilakukan penelitian mengenai peningkatan kualitas permukiman pada kawasan kumuh di Kecamatan Ilir Barat Dua yang berfokus pada wilayah Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur, studi lapangan melakukan inventarisasi data dengan pengamatan langsung dan tahapan penyusunan rencana peningkatan kualitas permukiman sesuai dengan tata ruang wilayah. Hasil indikator kekumuhan diperoleh bahwa sistem pengelolaan sampah, sistem drainase dan jalan lingkungan merupakan faktor yang tertinggi dengan nilai masing-masing sebesar 86%, 66% dan 30% untuk Kelurahan Tiga-puluh Ilir. Sedangkan untuk Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir juga memperoleh indikator kekumuhan terbesar yaitu sistem pengelolaan persampahan sebesar 81%, kualitas permukaan jalan lingkungan sebesar 70% dan ketersediaan drainase sebesar 51%. Melihat dari hasil tersebut maka fokus utama dari perencanaan peningkatan kualitas permukiman yaitu pada saluran drainase dan akses jalan.
Kata Kunci	ABSTRACT
<i>Quality of settlements, Slum areas, Drainage, Road access</i>	Better basic public service infrastructure is needed for the growth of the housing and settlement sector. Housing infrastructure is needed along with the growth of an area. Infrastructure that functions as a center of citizen activity plays an important role in improving the urban environment. Palembang City is one of the metropolitan cities that also has problems with the quality of settlements, namely slum areas. In this study, a study was conducted on improving the quality of settlements in slum areas in Ilir Barat Dua District which focused on the areas of Tiga-puluh Ilir Village and Tiga-puluh-dua Ilir Village. The research method used was literature study, field study conducting data inventory with direct observation and stages of preparing a settlement quality improvement plan in accordance with regional spatial planning. The results of the slum indicators obtained that the waste management system, drainage system and environmental roads were the highest factors with values of 86%, 66% and 30% for Tiga-puluh Ilir Village, respectively. Meanwhile, for Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir also obtained the largest slum indicators, namely the waste management system of 81%, the quality of the environmental road surface of 70% and the availability of drainage of 51%. Seeing these results, the main focus of planning to improve the quality of settlements is on drainage channels and road access.

PENDAHULUAN

Semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin meningkat pula kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk tersebut. Sarana dan prasarana yang mendukung penghidupan melalui pengembangan sektor perumahan seringkali meluas hingga ke wilayah pinggiran kota. Pembangunan sektor perumahan dan permukiman memerlukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar publik yang lebih baik. Seiring berkembangnya suatu wilayah, kebutuhan akan infrastruktur perumahan semakin meningkat. Infrastruktur yang menjadi landasan aktivitas warga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di perkotaan. Hal ini menyoroti pentingnya layanan infrastruktur lingkungan seperti infrastruktur air dan sistem sanitasi, selain penyediaan perumahan dan transportasi yang berkualitas, untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan perkotaan (Roeswitawati, et al 2022; Prasetiawan, et al 2024).

Salah satu permasalahan wilayah perkotaan adalah pada wilayah struktur tata ruang perkotaan, dimana banyak permukiman kumuh yang tidak terkelola. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang, lemahnya kapasitas pemerintah dan masyarakat lokal dalam memantau dan mengelola pembangunan, lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, dan kerja sama lintas daerah. Hal ini termasuk kurangnya semangat dan mekanisme untuk melakukan sinergi. Penanggulangan permasalahan lingkungan hidup di kawasan kumuh tidak bisa dilakukan sedikit demi sedikit, namun harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang bekerja sama dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang optimal (Aruan, et al 2020; Mulyan & Isnaini, 2022). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, analisis peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Upaya untuk menghidupkan kembali suatu area yang telah kehilangan vitalitasnya atau rusak disebut revitalisasi (Syafri, et al 2021).

Penelitian terdahulu mengenai kualitas

permukiman seperti di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang (Nurprasetyarani, et al 2025) telah berjalan melalui program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) melalui pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan infrastruktur dasar, peremajaan ruang terbuka hijau, fasilitas sanitasi dan distribusi air bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang baik untuk mengelola anggaran dan pemanfaatan lahan agar program dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, menurut penelitian Syafri, et al (2021) melakukan penelitian mengenai variabel yang berpengaruh pada penyebab kekumuhan seperti drainase, air minum, air limbah dan persampahan dengan metode analisis statistik. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel sumber air minum berpengaruh kuat sedangkan untuk air limbah dan persampahan berpengaruh sedang terhadap penyebab kekumuhan. Hal ini juga didukung dengan adanya pengaruh faktor sosial seperti yang dilakukan oleh Magfirah, et al (2022). Masih rendahnya pendapatan masyarakat, tidak meratanya pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada pencegahan permukiman kumuh. Adanya hal ini seharusnya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas yaitu pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Palembang terus berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan infrastruktur (prasarana, sarana dan utilitas) di berbagai kawasan permukiman yaitu salah satunya pada kawasan kumuh. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Palembang sebagai perangkat daerah Teknis yang menangani perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas permukiman menerima usulan dan identifikasi kebutuhan infrastruktur lingkungan dari masyarakat. Melihat dari kondisi eksisting pada Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang masih terdapat kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh dimana hal ini harus dilakukan peningkatan kualitas permukiman seperti yang diamanatkan dalam perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai Perencanaan Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian berada di Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir

Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif merupakan pendekatan yang menggunakan cara pandang dalam memahami masalah atau kondisi yang ada berdasarkan pada norma yang berlaku, kedua pendekatan fasilitatif dan partisipatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terakhir pendekatan teknis-akademis yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan cara ilmiah melalui teknik analisis dan penyusunan strategi. Secara ringkas, tahapan penelitian yang dilakukan adalah:

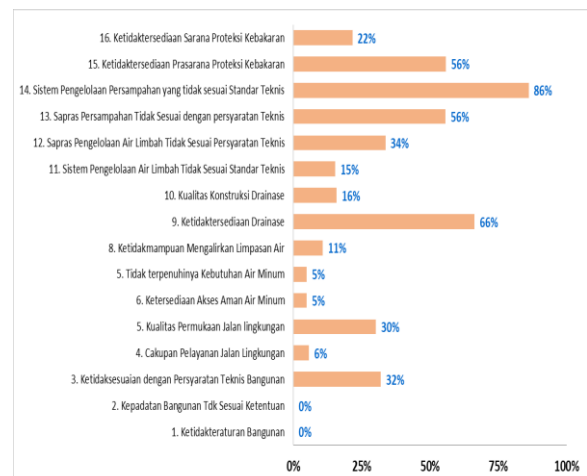
- 1) Desk Study (studi literatur): best practice, pedoman, literatur, studi terdahulu.
- 2) Field study (studi lapangan): Inventarisasi data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait maupun Survey pengamatan langsung (Banteng, 2015).
- 3) Tahapan Penyusunan Perencanaan Peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan dengan cara mereview kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian dengan dokumen tata ruang wilayah, koordinasi dengan perangkat daerah setempat, dan penyusunan desain teknis infrastruktur permukiman (Pakasi, et al 2017).

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan:

- 1) Pendataan permasalahan kawasan permukiman yang dituju dengan cara merekap dalam bentuk tabel dan grafik
- 2) Dari rekap data dalam bentuk grafik dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk melihat variabel kekumuhan mana yang dominan
- 3) Membuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang ada

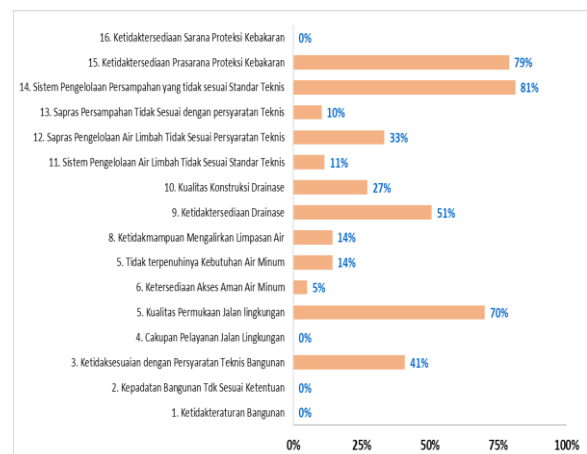
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Tiga-puluh Ilir merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam permukiman kumuh di Kota Palembang dengan katagori kumuh ringan hal ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang No.325/KPTS/DPRKP/2020 tentang Lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang.



Gambar 1. Grafik permasalahan kumuh di Kelurahan Tiga-puluh Ilir Kota Palembang

Seperti terlihat pada Gambar 1 di atas indikator kekumuhan di Kelurahan Tiga-puluh Ilir meliputi masih ada rumah tidak layak huni, kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan konstruksi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan serta saluran drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, masih ada masyarakat yang menggunakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis.



Gambar 2. Grafik permasalahan kumuh di Kelurahan Tiga-puluh -dua Ilir Kota Palembang

Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam permukiman kumuh di Kota Palembang dengan katagori kumuh ringan hal ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang No.325/KPTS/DPRKP/2020 tentang Lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang. Seperti terlihat pada Gambar 2

di atas indikator kekumuhan di Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir meliputi masih ada rumah tidak layak huni, kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan konstruksi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan serta saluran drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, masih ada masyarakat yang menggunakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis.

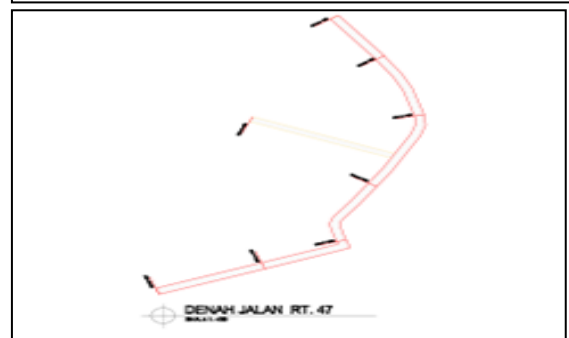
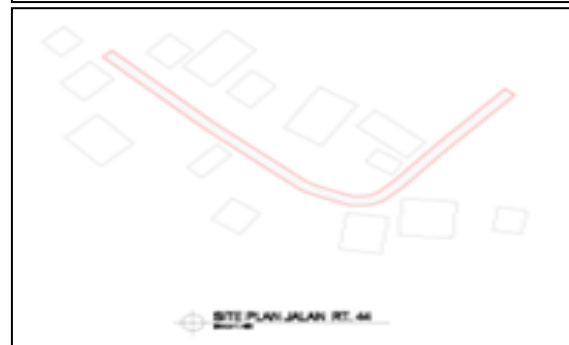
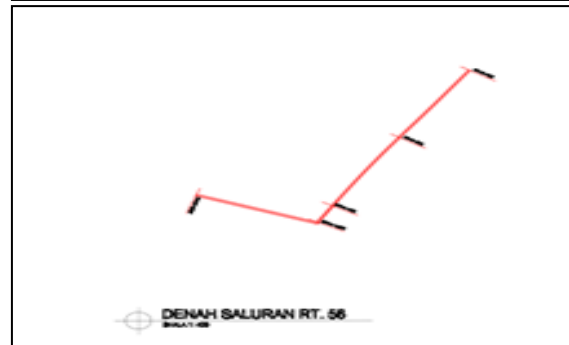


Gambar 3. Foto eksisting lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman di Kelurahan Tiga-puluh Ilir



Gambar 4. Foto eksisting lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman di Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir

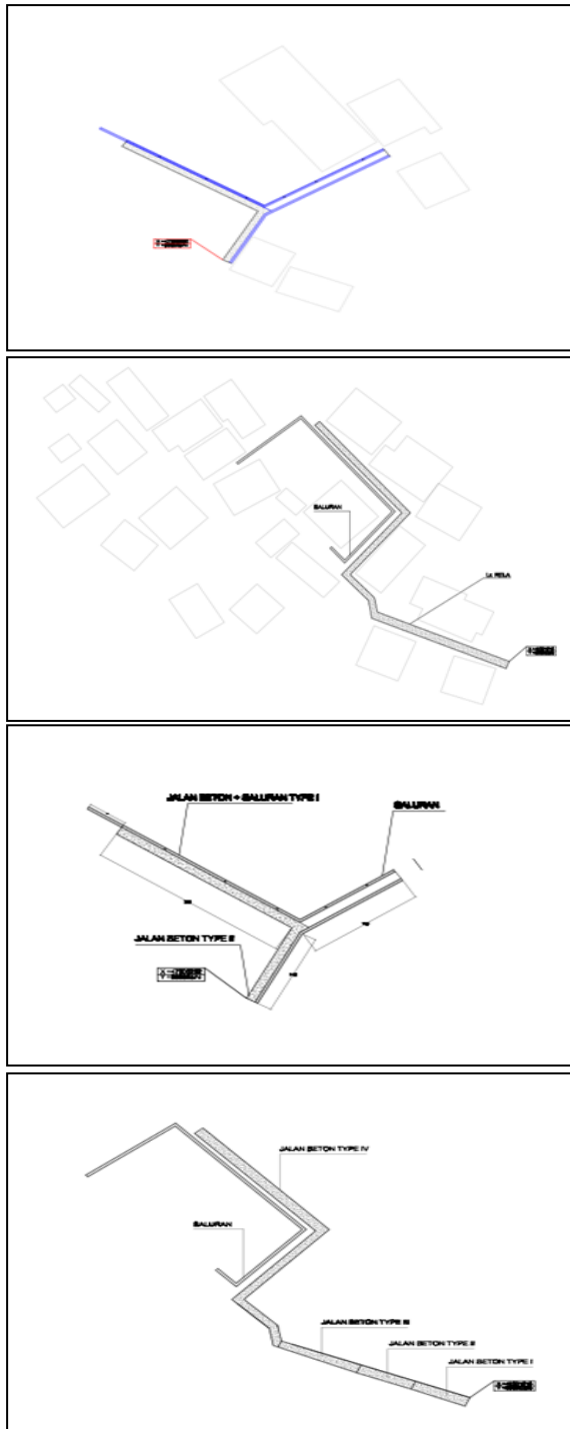
Dalam hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa daerah tinjauan sangat minim dengan adanya akses jalan yang baik dan juga sistem drainase yang ada. Akses jalan eksisting mengalami ambles dan juga kerusakan pada bagian struktur bawah sehingga membuat jalan menjadi miring dan tidak dapat dilalui lagi (Gambar 3 dan Gambar 4). Maka dari itu berdasarkan hasil pengamatan dan survei maka telah ditetapkan rencana letak lokasi peningkatan akses jalan dan drainase pada lokasi penelitian seperti yang dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.



Gambar 5. Rencana Peningkatan Jalan dan Saluran Kelurahan Tiga-puluh Ilir

Perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya UU No 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, paradigma perencanaan pembangunan berubah menjadi perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif menuntut agar masyarakat dapat berperan serta di dalam merumuskan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan wujud dari

perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional dari paradigma terpusat menjadi desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, perencanaan strategis dipilih sebagai bentuk perencanaan yang digunakan untuk merumuskan rencana-rencana pembangunan.



Gambar 6. Rencana Peningkatan Jalan dan Saluran Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir

Perencanaan strategis adalah usaha terarah untuk menghasilkan keputusan dan tindakan fundamental yang membentuk dan mengatur jalannya suatu organisasi atau suatu badan

instansi. Selain itu, perencanaan strategis dipilih karena memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat di dalam proses perencanaan. Dari sini masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi di dalam merumuskan perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar (Wulandari, et al 2022). Kebijakan umum pembangunan infrastruktur atau prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Adapun strategi dalam penanganan permukiman kumuh pada lokasi ini yaitu:

- 1) Mewujudkan proses perencanaan pembangunan infrastruktur daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Manaf, et al 2023).
- 2) Menghasilkan rencana pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang relevan, terintegrasi, dan mampu mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau (Primordia, et al 2023).
- 3) Mengoptimalkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan keputusan dan tindakan fundamental pembangunan daerah
- 4) Pelaksanaan FGD/Lokakarya Partisipatif untuk merumuskan usulan dan keputusan fundamental PSU.
- 5) Sinkronisasi Renstra PSU dengan Musrenbang dan alokasi anggaran daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei dan analisis data yang telah dilakukan terhadap kondisi kualitas permukiman di Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang yang diwakili oleh Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir diperoleh bahwa perlu dilakukan peningkatan terhadap akses jalan maupun drainase setempat. Kelurahan Tiga-puluh Ilir memiliki indikator kekumuhan terbesar yaitu 86% pada indikator sistem pengelolaan persampahan dan diikuti oleh indikator ketidaksediaan drainase sebesar 66%

dan untuk indikator jalan lingkungan sebesar 30%. Sedangkan untuk Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir juga memperoleh indikator kekumuhan terbesar yaitu sistem pengelolaan persampahan sebesar 81%, kualitas permukaan jalan lingkungan sebesar 70% dan ketersediaan drainase sebesar 51%. Melihat dari hasil tersebut maka fokus utama dari perencanaan peningkatan kualitas permukiman yaitu pada saluran drainase dan akses jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, R., & Rawaty, N. (2020). Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Madya Pematang Siantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 761-768.
- Banteng, B. S. (2015). Analisis Keberhasilan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo. *Prosiding PESAT*, 6.
- Manaf, M., & Latief, R. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Urban and Regional Studies Journal*, 5(2), 192-200.
- Magfirah, A., Syafri, S., & Ruslan, R. (2022). Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(2), 129-139.
- Mulyan, A., & Isnaini, L. M. Y. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Masmas Kecamatan Batu Kaliang Utara Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3).
- Nurprasetyarani, S. Z., & Suwitri, S. (2025). Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 456-475.
- Pakasi, C. B., & Ngangi, C. R. (2017). Analisis Perencanaan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 13(1A), 101-108.
- Prasetiawan, J., Patoni, K., Fadhiyani, Z., Hendrianto, H., & Habiburrahman, H. (2024). Sosialisasi KRS BP2P untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Pariwisata di Desa Aik Bukaq. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 4(2), 99-105.
- Primordia, Y. P., Astasy, N., Ikhwan, S. N., Shafira, D. A., Sari, S. O., & Firda, A. F. (2023, May). Program Prioritas BPS Dalam Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kemasrindo, Kertapati Kota Palembang. In *FORUM MEKANIKA (Vol. 12, No. 1, pp. 9-18)*.
- Roeswitawati, D., Mahabella, L. S., Sofiyani, I. R., & Adibah, A. N. (2022). Perbaikan Drainase untuk Mengatasi Limpasan Air Hujan dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman RW 07 Kelurahan Merjosari. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 482-489.
- Syafri, S., & Rahman, R. (2021). Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(2), 105-113.
- Wulandari, A., Amin, C., & Arinta, R. T. (2022). Pemetaan Swadaya pada Program Peningkatan Kualitas Permukiman Berbasis Masyarakat. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 138-146.